

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* (kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, ukuran dewan komisari, jumlah komite audit dan dewan direksi) Dan Pemilihan Auditor Eksternal antara perusahaan keuangan dengan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia selama tahun penelitian.

Menurut data Pusat Pembinaan Akuntan Publik dan Jasa Penilai (PPAJP), pada tahun 2010 terdapat 404 kantor akuntan publik terdaftar di Indonesia yang menyediakan jasa audit. Dari jumlah tersebut, 48 diantaranya merupakan kantor akuntan publik yang berafiliasi dengan jaringan internasional dan sisanya merupakan kantor akuntan publik lokal. Dalam Aksu, Onder dan Saatcioglu (2007) menyebutkan penelitian Firth dan Smith, 1992 serta DeFond, 1992 yang menyatakan bahwa audit adalah produk yang terdiferensiasi pada kualitas.

Banyaknya kantor akuntan publik yang terdapat di Indonesia, dengan variasi sumber daya yang mereka miliki, memungkinkan mereka menyediakan kualitas audit yang beragam. Kualitas audit merupakan faktor yang sangat sulit untuk diukur secara langsung. Salah satu proksi yang biasa digunakan untuk mengukur kualitas audit adalah ukuran dari kantor akuntan publik (DeAngelo, 1981; Palmrose, 1988). Semakin besar ukuran suatu kantor akuntan publik (diproksikan dengan jumlah pendapatan), maka akan lebih baik pula kualitas audit yang disediakan oleh kantor akuntan publik tersebut. Van Zijl (2008) menyatakan bahwa pendapatan kantor akuntan publik akan mempengaruhi kemampuan mereka dalam mendapatkan sumber daya yang diperlukan, misalnya jumlah anggota tim dan jam kerja, untuk melakukan audit yang kemudian akan berdampak pada kualitas audit yang disediakan.

Studi mengenai pemilihan auditor telah beberapa kali dilakukan di beberapa negara, terutama negara maju, misalnya Amerika Serikat (Beasley dan Petroni, 2001; Copley dan Douthett, 2002), Inggris (Chaney et al., 2004), Finlandia (Niskanen et al., 2010) dan Selandia Baru (Firth dan Smith, 1992). Studi mengenai pemilihan auditor di negara berkembang masih jarang dilakukan. Adapun penelitian di negara berkembang baru dilakukan oleh (Ashbaugh dan Warfield, 2003) (Aksu et al, 2007), (Van Zijl, 2008), (Lin dan Liu, 2009), (Balafif, 2010) dan (Markali dan Rudiawardani, 2012).

Berdasarkan penelitian yang sebelumnya oleh Lin and Liu (2009) yang menunjukkan bahwa auditor besar lebih mampu menyakinkan investor dalam penawaran perdana dalam kegiatan berinvestasi. Selain itu menurunnya mekanisme *corporate governance* perusahaan akan lebih cenderung menolak untuk memilih auditor yang berkualitas tinggi. Hasil penelitian Markali dan Rudiawardani (2012) menunjukkan bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* yang baik memungkinkan manajemen memilih auditor yang berkualitas untuk perusahaannya, dan begitupun sebaliknya. Ashbaugh and Warfield (2003) menunjukkan hasil penelitian di pasar Jerman yaitu perusahaan lebih cenderung untuk menyewa auditor yang bereputasi ketika perusahaan memiliki kepentingan untuk kredit, pemegang saham dan pemasok dari pihak asing. Serta perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh keluarga lebih cenderung memilih auditor yang bereputasi di Jerman. Artinya bahwa auditor memainkan peran penting dalam penerapan mekanisme *corporate governance* ketika perusahaan dituntut untuk memberikan informasi yang handal untuk *stakeholders* perusahaan.

Menurut Survei *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) menempatkan Indonesia sebagai negara Asia terburuk kedua dalam sistem birokrasi. Survei itu akan menjadi cermin bagi upaya reformasi birokrasi di Indonesia.” Survei PERC itu dapat mencerminkan padangan para pebisnis tentang birokrasi di Indonesia,” kata Juru Bicara Wakil Presiden Boediono dalam Nugroho (2011).

PERC yang bermarkas di Hong Kong meranking negara-negara di Asia dalam hal birokrasi dimana nilai 10 merupakan nilai terburuk. Urutan pertama adalah India (9,41), Indonesia (8,59), Filipina (8,37), Vietnam (8,13), China (7,93), Malaysia (6,97), Taiwan (6,60), Jepang (6,57), Korea Selatan (6,13), dan Thailand (5,53). Menurut penelitian boot-Allen & Hamilton, seperti dikutip Irwan (2000), Huther and Shah (2000), dan Sri Y. Susilo (2000) Rendahnya indeks *good governance* di Indonesia didukung oleh hasil studi Huther dan Shah (1998) yang menyatakan bahwa Indonesia termasuk ke dalam kategori negara *poor governance*. Banyaknya skandal manipulasi melibatkan beberapa perusahaan besar yang dahulunya mempunyai kualitas audit yang tinggi di Indonesia seperti PT. Lippo Tbk, Bank Bali dan PT. Kimia Farina, Tbk yang melibatkan pihak eksternal maupun internal perusahaan untuk melakukan manipulasi pelaporan keuangan (Gideon, 2005).

Banyaknya kasus manipulasi yang melibatkan *Chief Excektif Officer* (CEO), komisaris, komite audit, internal dan eksternal audit dalam melakukan kecurangan akuntansi akan menyebabkan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap kinerja perusahaan yang sering ditandai dengan adanya penurunan harga saham perusahaan (Susiana dan Herawaty, 2007). Hal tersebut terjadi karena adanya rekayasa kinerja yang dikenal dengan istilah *earning manajement* yang sejalan dengan munculnya teori agensi (*agensi theory*) yang menekankan pentingnya pemilik perusahaan (*principles*) menyerahkan pengelolaan perusahaan kepada profesional (*agents*) yang lebih mengerti dan memahami cara untuk menjalankan suatu usaha. Adanya kepentingan antara *principles* dan *agents* memunculkan adanya konflik kepentingan yang dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan didalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga baik *shareholders* (Mark et al, 1998).

Sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting terhadap pertumbuhan perekonomian negara, sehingga sangat penting bagi perusahaan untuk mempunyai mekanisme *corporate governance* yang baik. Peran auditor eksternal dalam mekanisme *corporate governance* sangatlah penting yaitu sebagai pengawas dalam proses laporan keuangan perusahaan (Ashbaugh dan Warfield,

2003). Artinya bahwa dengan adanya mekanisme *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal *Big Four* berkualitas akan mengarahkan manajemen perusahaan untuk mengelola keuangannya dengan baik.

Banyaknya kantor akuntan publik di Indonesia memungkinkan adanya kualitas audit yang berbeda karena kualitas audit merupakan faktor yang sulit diukur secara langsung. Menurut De Angelo (1981) dan Palmrose (1988) ada proksi yang biasa digunakan dalam mengukur kualitas audit yaitu dengan melihat ukuran dari kantor akuntan publik yang dilihat dari tingkat pendapatan yang diperolehnya.

Sektor property telah menjadi salah satu sektor yang menarik di Indonesia, dimana pasar diproyeksikan akan bergerak menuju arah yang positif. Pertumbuhan ekonomi nasional menjadi salah satu faktor yang kuat dibalik kondisi pasar yang lebih tinggi. Di pasar real estate Indonesia, Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi (Jabodetabek) telah menjadi segmen terbesar dalam hal kontribusi daerah dan pendapatan di pasar real estate Indonesia secara keseluruhan (marketplus.co.id). Perkembangan sub sektor properti dan real estate ini juga didukung dengan kenaikan nilai rata-rata total aset subsektor property dan real estate dari tahun 2012-2016 seperti yang tertera di table 1.1

Tabel 1.1

Perkembangan Rata-Rata Total Aset Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar Pada Tahun 2012-2016

Tahun	Rata-rata Total Aset
2012	2,75 Miliar Rupiah
2013	3,45 Miliar Rupiah
2014	3,78 Miliar Rupiah
2015	3, 82 Miliar Rupiah
2016	4,25 Miliar Rupiah

Sumber : Idx.co.id

Perkembangan industri *property* dan *real estate* yang begitu besar, sejalan dengan usaha pemerintah dalam mengatasi masalah *backlog* yang berdasarkan data

proyeksi Kementrian Pekerjaan Umum dan Prumahan Rakyat Republik Indonesia tahun 2015 Indonesia masih memerlukan 11,4 juta unit rumah sampai tahun 2030.

Menurut Kyle dan Baird dalam Aurota (2011), properti dikarifikasikan menjadi empat macam, yaitu:

1. *Residensial real estate* meliputi perusahaan penduduk, baik milik pribadi maupun milik pemerintah dan institusional.
2. *Commersial real estate* meliputi bangunan perkantoran dan properti retail.
3. *Industrial property* meliputi pabrik manufaktur berat dan ringan, gudang untuk penyimpanan dan pendistribusian produk.
4. *Spesial purpose property* meliputi hotel, kmotel, klub resort, rumah sakit, teater, sekolah, universitas, institusi pemerintah, tempat ibadah. Umumnya aktivitas yang terjadi dalam bangunan ini merupakan bisnis khusus.

Untuk konstruksi meliputi semua kegiatan yang hasil akhirnya berupa bangunan/konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, baik dimanfaatkan untuk tempat tinggal atau sarana kegiatan lainnya. Hasil kegiatan tersebut antara lain bias digunakan secara individu atau umum seperti jalan, gedung, jembatan, rel, dan jembatan kereta api, terowongan, bangunan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan bangunan jaringan komunikasi. Kegiatan konstruksi meliputi perencanaan, persiapan perubahan, pembongkaran dan perbaikan bangunan. Proses produksi dari sector konstruksi membutuhkan input dari sector lain, sementara itu hasil akhir dari produk sector ini akan dipergunakan lagi oleh sector lain baik sebagai *customer goods* ataupun *investment goods* (Wibowo dalam Wibowo dan Hadihardaja, 2006).

Untuk memastikan manajemen perusahaan berjalan dengan baik pada saat pengelolaan aktivitas perusahaan maka praktik *corporate governance* dibutuhkan Tim *Good Corporate Governance* Badan Pengawasan Keuangan dan Pengembangan (BPKP) (2008) menjelaskan GCG dari segi *soft definition* yaitu komitmen, aturan main, serta prektik penyelenggaraan bisnis secara sehat dan

beretika.

Di antara beberapa komponen *corporate governance* perusahaan yang berpengaruh terhadap keputusan penunjukan kantor akuntan publik sebagai penyedia jasa audit terhadap perusahaan, penelitian ini berfokus pada kepemilikan saham terbesar dan ukuran dewan komisaris merujuk kepada studi yang dilakukan Lin dan Liu (2009), serta efektivitas komite audit yang merujuk kepada studi Balafif (2010). Studi yang pernah dilakukan sebelumnya mengenai kepemilikan saham terbesar, ukuran dewan komisaris, serta komite audit sebagai proksi mekanisme *corporate governance* masih memiliki hasil yang beragam dan studi ini bermaksud untuk mengisi gap tersebut. Studi ini menjadi penting karena ketiga faktor tersebut merupakan mekanisme internal utama *corporate governance* perusahaan.

Ada empat mekanisme *corporate governance* yang sering dipakai dalam berbagai penelitian mengenai *corporate governance* yang bertujuan untuk mengurangi konflik keagenan yaitu komisaris independen, jumlah komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial (Maharani (2012), Balafif (2010), Asbaugh et al (2003), dan Wardhani (2006)). Komposisi dewan komisaris merupakan salah satu karakteristik dewan yang berhubungan dengan kandungan informasi laba. Melalui perannya dalam menjalankan fungsi pengawasan, komposisi dewan dapat mempengaruhi pihak manajemen laporan keuangan sehingga dapat diperoleh suatu laporan laba yang berkualitas (Siregar, 2005).

Selain dewan komisaris independen, intensitas pertemuan dewan komisaris serta ukuran dewan. Komisaris (*board size*) turut berperan penting dalam penerapan *Corporate Governance*. Beasley (1996) dalam Yatim et al (2006) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris secara signifikan mempengaruhi adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka semakin besar pula kemungkinan adanya kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dan sebaliknya.

Untuk dapat bekerja secara tepat guna dalam suatu lingkungan usaha yang kompleks, dewan komisaris harus mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite perusahaan. Komite yang umumnya dibentuk adalah komite kompensasi/Remunerasi untuk badan eksekutif dalam perusahaan, komite nominasi dan komite audit. Berdasarkan Surat keputusan ketua BAPEPAM KEP41/PM/2003, SK. Dir. BEJ Nomor: 315/BEJ,106-2000, Keputusan Menteri BUMN Nomor: 117 Tahun 2000 dan Undang – Undang BUMN Nomor: 19/2003, pembentukan komite audit merupakan suatu keharusan. Komite audit memegang peran penting dalam mendampingi dewan komisaris dalam menjalankan tugas serta mengawasi pelaksanaan tanggungjawab yang berkaitan dengan pembuatan laporan keuangan, sistem pengendalian internal, sistem manajemen resiko serta fungsi audit internal dan eksternal. Komite audit berfungsi sebagai mediator dalam berkomunikasi antar dewan direksi, akuntan publik dan internal auditor (Ikatan Komite Audit Indonesia, 2004).

Dalam studi yang dilakukan Lin dan Liu (2009), penelitian dalam hal mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal dengan hasil penelitian menyatakan bahwa perusahaan dengan pemegang saham yang lebih besar atau CEO dan ketua dewan komisaris dengan orang yang sama maka akan kecil kemungkinan untuk menyewa 10 top auditor di China. Sehingga lemahnya perusahaan dalam memilih auditor yang berkualitas karna kurangnya manfaat yang ada dalam mekanisme *corporate governance* diperusahaan tersebut.

Cheng (2009) melakukan penelitian mengenai pemilihan auditor yang mempengaruhi manajemen dalam tata kelola perusahaan baik secara eksternal maupun internal yang berkaitan dengan manajemen laba (studi negara China) dengan hasil bahwa auditor dengan berkualitas tinggi menyediakan mekanisme *corporate governance* yang lebih signifikan karena adanya pengaruh demografi dan karakteristik dalam manajemen tata kelola perusahaan sehingga mempengaruhi pemilihan auditor. Dengan adanya CEO yang memiliki sertifikasi akademik dan profesional maka CEO cenderung memilih auditor yang berkualitas tinggi bagi perusahaanya.

Penelitian ini dilakukan untuk menguji mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari ukuran kepemilikan saham institusional, ukuran kepemilikan manajerial, jumlah dewan komisaris, jumlah komite audit dan jumlah dewan direksi. Dan Pemilihan Auditor Eksternal yang masuk kedalam *Big Four* Auditor Eksternal.

Penelitian ini melakukan uji bedapada perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang menerapkan mekanisme *corporate governance* Dan Pemilihan Auditor Eksternal. Replikasi penelitian ini menggunakan replikasi penelitian milik Dedi Putra, 2014 yang berjudul Pengaruh Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Pemilihan Auditor Eksternal, yang tujuan penelitiannya untuk menguji secara empiris pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor yang bereputasi serta untuk menguji secara komparatif mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian ini melakukan uji bedamengenai mekanisme *corporate governance* Dan Pemilihan Auditor Eksternal dan penelitian ini menambahkan variabel X yaitu Dewan Direksi dan mengubah studi menjadi perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan sedangkan penelitian sebelumnya menguji secara pengaruh serta secara komparatif mengenai mekanisme *corporate governance* terhadap pemilihan auditor eksternal dengan studi pada perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan. Dapat saya di simpulkan penelitian ini menggunakan judul “Perbedaan Mekanisme *Corporate Governance* Dan Pemilihan Auditor Eksternal (Studi pada perusahaan industri keuangan dan industri properti, real estate dan konstrksi bangunan).”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* yang di

proksikan dengan kepemilikan saham institusional antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?

2. Apakah terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan saham manajerial antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?
3. Apakah terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah dewan komisaris antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?
4. Apakah terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah komite audit antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?
5. Apakah terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah dewan direksi antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?
6. Apakah terdapat perbedaan dalam pemilihan auditor eksternal antara perusahaan keuangan dan perusahaan properti?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Penulis membatasi penelitian ini dalam jangka waktu tahun, yaitu periode 2015-2017 Sesuai dengan perumusan masalah dan latar belakang yang telah diuraikan, maka pembatasan masalah perlu dilakukan dalam penelitian ini. Data yang digunakan adalah data perusahaan-perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia periode 2015-2017. Data yang digunakan adalah data perusahaan keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Penulis mengambil informasi lainnya yang berasal dari buku, jurnal, situs, dan publikasi ilmiah lainnya.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* yang

di proksikan dengan kepemilikan saham institusional pada spesialisasi industri keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan kepemilikan saham manajerial pada spesialisasi industri keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
3. Untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah dewan komisaris pada spesialisasi industri keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah komite audit pada spesialisasi industri keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
5. Untuk melakukan uji beda mengenai mekanisme *corporate governance* yang di proksikan dengan jumlah dewan direksi pada spesialisasi industri keuangan dan perusahaan properti dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.
6. Untuk melakukan uji beda mengenai pemilihan auditor eksternal pada spesialisasi industry keuangan dan properti , real estate dan konstruksi bangunan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang berjudul “Perbedaan Mekanisme *Corporate Governance* Dan Pemilihan Auditor Eksternal” adalah:

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan pertimbangan untuk lebih memperhatikan pelaksanaan mekanisme *corporate governance* dan pemilihan auditor eksternal sehingga diharapkan dapat memberi pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan yang tercermin dari tingkat rekayasa yang dilakukan manajemen. Selain itu penerapan mekanisme *corporate*

governance dan pemilihan auditor eksternal diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan *stakeholders*.

2. Bagi akademisi dan peneliti, dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam berkaitan dengan pemilihan auditor eksternal,
3. Bagi para peneliti dan akademisi dalam menjawab pertanyaan apakah secara empiris terdapat perbedaan mekanisme *corporate governance* dalam pemilihan auditeksternal.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini tercantum latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Dalam bab ini memuat tentang teori teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesa (bila diperlukan).

BAB III Metode Penelitian

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan / rancangan /

modelalat / teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

BAB V Simpulan dan Saran

Kesimpulan merupakan rangkuman dari pembahasan, yang sekurang-kurangnya tersiri dari; (1) jawaban terhadap perumusan masalah dan tujuan penelitian serta hipotesis; (2) hal baru yang ditemukan dalam prospek temuan; (3) pemaknaan teoritik dari hal baru yang ditemukan. Saran merupakan implikasi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penggunaan praktis. Sekurang-kurangnya memberi saran bagi perusahaan (objek penelitian) dan penelitian selanjutnya, sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbatasan penelitian yang dilakukan.